

METONIMI RETORIS DALAM HADIS KEPEMIMPINAN: ANALISIS STRUKTURAL MAJAZ MURSAL DAN IMPLIKASI POLITIKNYA

Aang Saaeful Milah¹, Febri Ferdiansah², Ahmad Hizazih Al-Faqih³, Dea Puspita⁴,
Ola Alifiyanti Zahra Purnama⁵

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten^{1,2,3,4,5}

aang.saaefulmilah@uinbanten.ac.id¹, 231370013.febri@uinbanten.ac.id²,
231370016.ahmadfaqih@uinbanten.ac.id³, 231370004.dea@uinbanten.ac.id⁴,
231370005.ola@uinbanten.ac.id⁵

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published : 30 Juni 2026

Keywords

Hadis Kepemimpinan,
Majaz Mursal, Metonimi
Retoris, Ilmu Balaghah,
Implikasi Politik.

*Leadership Hadiths,
Majaz Mursal, Rhetorical
Metonymy, Balaghah
Studies, Political
Implications.*



© Author(s) 2026
This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara struktural manifestasi gaya bahasa Majaz Mursal (metonimi retorik) dalam hadis-hadis kepemimpinan serta mengungkap implikasi politik substantif di balik penggunaan struktur tersebut. Melalui pendekatan kualitatif studi kepustakaan (library research), penelitian ini mengintegrasikan Ilmu Balaghah klasik (khususnya Ilmu Bayan) dengan Analisis Wacana Politik Profetik sebagai kerangka interdisipliner. Korpus penelitian dipilih secara purposive sampling dari Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, menghasilkan lima hadis otoritatif yang mewakili lima turunan hubungan logika ('alaqah): Al-Juz'iyah, Al-Mahalliyyah, Sababiyyah, Al-Kulliyyah, dan Musabbabiyyah. Hasil dekonstruksi tekstual menunjukkan bahwa setiap hadis memiliki indikator pembatas semantik (qarinah) yang secara konsisten menolak pembacaan literal (hakiki). Analisis kritis-argumentatif membuktikan bahwa penggunaan Majaz Mursal dalam wacana politik profetik berfungsi sebagai instrumen kognitif untuk menggeser egosentrisme personal penguasa menuju supremasi sistem hukum, perlindungan hak-hak sipil, dan akuntabilitas publik. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan berupa paradigma "Metonimi Politis Profetik" yang menjembatani estetika sastra Arab dengan teori konstitusionalisme modern, sekaligus mendekonstruksi pemahaman literalis-radikal atas hadis-hadis pemerintahan.

This study aims to structurally analyze the manifestation of Majaz Mursal (rhetorical metonymy) in leadership hadiths and to reveal the substantive political implications behind the use of such structures. Using a qualitative library research approach, this study integrates classical Balaghah studies, particularly Ilm al-Bayan, with Prophetic Political Discourse Analysis as an interdisciplinary framework. The research corpus was selected through purposive sampling from Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, resulting in five authoritative hadiths representing five derivative logical relations ('alaqah): al-Juz'iyah, al-Mahalliyyah, Sababiyyah, al-Kulliyyah, and Musabbabiyyah. The results of the textual deconstruction demonstrate that each hadith contains semantic restriction indicators (qarinah) that consistently reject literal (haqiqi) interpretation. The critical-argumentative analysis proves that the use of Majaz Mursal in prophetic political discourse

functions as a cognitive instrument to shift the ruler's personal egocentrism toward the supremacy of legal systems, the protection of civil rights, and public accountability. This study contributes a novel paradigm termed "Prophetic Political Metonymy," which bridges the aesthetics of Arabic rhetoric with modern constitutionalism theory while simultaneously deconstructing literalist-radical understandings of governmental hadiths.

PENDAHULUAN

Wacana kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan dalam konstelasi politik kontemporer global menghadapi tantangan disrupsi kepercayaan publik yang sangat akut.¹ Di tengah menguatnya pragmatisme politik, retorika para pemimpin dunia sering kali terjebak dalam dikotomi transaksional yang menegasikan nilai-nilai moralitas fundamental. Dalam kajian komunikasi politik, efektivitas kepemimpinan tidak hanya diukur melalui instrumen kebijakan empiris, melainkan melalui bagaimana pesan-pesan otoritas, keadilan, dan akuntabilitas dikonseptualisasikan secara bahasa.² Bahasa politik bukan sekadar alat komunikasi netral, melainkan sebuah instrumen kekuasaan yang membentuk realitas sosial dan mengarahkan kepatuhan publik. Oleh karena itu, meneliti kembali akar retorika kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai profetik universal menjadi sangat urgensi secara konseptual dan empiris guna merekonstruksi etika politik modern.

Dalam tradisi peradaban Islam, hadis Nabi Muhammad saw. menempati posisi epistemologis yang otoritatif, baik sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an maupun sebagai representasi puncak kefasihan berbahasa Arab (*jawami' al-kalim*).³ Rasulullah saw. dikenal memiliki kemampuan retorika superior yang mampu memadukan keringkasn teks dengan kedalaman makna (*balagah*). Ketika berbicara mengenai urusan tata negara, kekuasaan, dan hubungan hierarkis antara pemimpin (*amir*) dan rakyat (*ra'iyyah*), teks hadis tidak menggunakan artikulasi hukum yang kaku dan literal.⁴ Sebaliknya, teks-teks kepemimpinan profetik tersebut dipenuhi oleh ornamen stilistika, salah satunya melalui pemanfaatan majaz (metafora dan metonimi) untuk mentransformasikan konsep teologis-politik yang abstrak menjadi instruksi praktis yang aplikatif bagi masyarakat lintas zaman.⁵

¹ Cristine de Clercy, *The Complex Challenges of Modern Leadership: A Scholarly Overview of Ethics, Democracy, and Political Leadership*, t.t., <https://doi.org/10.17645/pag.11151>.

² Rifal Saefudin dkk., "The Leadership of Prophet Muhammad: A Role Model of Politics and Ethics in the Modern Era," *Edusoshum : Journal of Islamic Education and Social Humanities* 6, no. 1 (2025): 134–40, <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v6i1.238>.

³ Mohamad Anang Firdaus, "Linguistic Complexity in Hadith: An Examination of the Role and Origins of 'Al-Kalimat Al-Mubtakirah' in Hadith," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 24, no. 2 (2023): 425–50, <https://doi.org/10.14421/qh.v24i2.4634>.

⁴ Yaşar Seracettin Baytar, *Hadislerde Beyân ve Bedî İlmiyle İlgili Edebî Sanatların Kullanıma Dair Örnekler*, 2022 (2022): 0–1.

⁵ Yuyun Rohmatul Uyuni dkk., "Arabic Qur'anic Near-Synonymy: A Corpus-Based Analysis of Al-Raghib Al-Aṣfahani's Mufradat Alfaz Al-Qur'an," *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab* 18, no. 1 (2026): 87–110, <https://doi.org/10.24042/4h3p6t28>.

Salah satu instrumen paling krusial dalam Ilmu Bayan (cabang Ilmu Balagh) yang mengonstruksi wacana politik profetik adalah *Majaz Mursal* (Metonimi Retoris).⁶ Berbeda dengan *Majaz Isti'arah* yang bertumpu pada hubungan keserupaan ('*alaqah musyabahah*), *Majaz Mursal* beroperasi melalui hubungan logika non-keserupaan ('*alaqah ghair musyabahah*), seperti kausalitas (*sababiyah-musabbabiyah*), spasial (*mahalliyah*), maupun struktural organ (*juz'iyah-kulliyah*).⁷ Dalam konteks kepemimpinan, pergeseran makna dari denotatif (hakiki) menuju konotatif (majazi) melalui *Majaz Mursal* ini bukan sekadar hiasan estetika sastra Arab klasik. Pilihan kata metonimik yang digunakan Rasulullah saw. memiliki fungsi kognitif-politis untuk menegaskan batasan otoritas, memitigasi tirani, dan mendeklarasikan hak-hak sipil dengan daya persuasi yang tinggi.⁸

Studi mengenai aspek sastra dan stilistika hadis telah menarik perhatian luas dari para sarjana dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sejumlah peneliti berfokus pada analisis linguistik umum hadis-hadis dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dengan menyoroti aspek fonologi, morfologi, dan semantik makro. Penelitian-penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa struktur kebahasaan hadis memiliki konsistensi ritme dan ketepatan diksi yang mukjizat.⁹ Pendekatan metodologis yang dominan digunakan dalam kluster penelitian ini adalah stilistika deskriptif yang memetakan jenis-jenis gaya bahasa Nabi secara tekstual tanpa menghubungkannya dengan implikasi sosiologis di luar teks.

Di sisi lain, literatur terkini yang mengeksplorasi *Majaz Mursal* secara spesifik umumnya mendomestifikasi objek kajiannya pada hadis-hadis bertema eskatologi, ibadah, dan akhlak personal. Studi terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan metonimi dalam hadis eskatologis berfungsi untuk mengonkretkan hal-hal gaib, seperti siksa kubur dan nikmat surga, agar lebih mudah diinternalisasi oleh nalar manusia. Sementara itu, kajian *Majaz Mursal* dalam hadis ibadah berfokus pada penyebutan rukun fisik (seperti sujud) untuk mewakili keseluruhan entitas ibadah (shalat).¹⁰ Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang kaya bagi perkembangan Ilmu Bayan, mereka belum menyentuh ranah hadis sosiopolitical yang memiliki karakteristik wacana yang jauh lebih kompleks dan sarat kepentingan sosiologis.

Sebaliknya, penelitian terhadap hadis-hadis kepemimpinan (*Hadits al-Imarah*) sejauh ini masih didominasi oleh pendekatan fikih politik (*siyasah syar'iyah*), teologis, dan historis. Para sarjana hukum

⁶ Uyuni dkk., "Arabic Qur'anic Near-Synonymy."

⁷ Hilda Khaerunnisa dan Farhan Firdaus, *Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban A Balāghah Analysis of Majāz Mursal Usage in the Verses of the Qur'ān*, 07, no. 1 (2026): 69–86.

⁸ Mashael AlAjmi, "A Cognitive Study of Metaphors in the Glorious Qur'an: From a Linguistic to a Conceptual Approach," *Arab World English Journal For Translation and Literary Studies* 3, no. 2 (2019): 114–21, <https://doi.org/10.24093/awejtls/vol3no2.10>.

⁹ Hishomudin Ahmad dkk., "Hadis Amalan Terbaik Dalam Sahih Bukhari: Analisa Stilistik Fonosemantik," *Journal Of Hadith Studies* 9, no. 1 (2024): 144–55, <https://doi.org/10.33102/johs.v9i1.295>.

¹⁰ Abdullah Afifi dan Edi Komarudin, *Metafora Al-Qur'an: Majaz Mursal dalam Surat Asy-Syu'ara*, 1, no. 4 (2021): 497–502.

Islam secara masif meneliti hadis kepemimpinan untuk merumuskan syarat-syarat menjadi kepala negara, kewajiban ketaatan rakyat, maupun konsep khilafah dalam lintasan sejarah Islam.¹¹ Pendekatan yang digunakan hampir seluruhnya bersifat dogmatis-normatif dan literal-tekstual. Akibatnya, dimensi kebahasaan dan struktur retorika yang membungkus doktrin-doktrin politik tersebut terabaikan, seolah-olah teks hadis kepemimpinan hanyalah lembaran hukum positif yang steril dari aspek keindahan sastra dan strategi persuasi komunikasi politik.

Kondisi literatur di atas menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang sangat mengganggu, baik secara konseptual maupun teoretis. Celah pertama bersifat konseptual-teoretis: terdapat pemisahan (*dikotomi*) yang tajam antara kajian balagh yang estetis-tekstual dengan kajian siyasah yang praktis-empiris. Belum ada sintesis teoretis yang secara eksplisit memetakan bagaimana struktur *Majaz Mursal* dalam hadis kepemimpinan bekerja sebagai produsen makna politik.¹² Kita belum mengetahui bagaimana '*alaqah* seperti *juz'iyah* atau *mahalliyyah* dalam sabda Nabi tidak hanya menggeser makna kata, melainkan juga menggeser paradigma kekuasaan dari yang bersifat absolut menjadi akuntabel.

Celah kedua bersifat metodologis. Mayoritas penelitian balagh konvensional terjebak dalam metode "labelisasi" atau sekadar mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ayat atau hadis ke dalam kotak-kotak definisi *Majaz Mursal* tanpa melakukan dekonstruksi mendalam terhadap struktur teksnya (*close textual analysis*). Analisis sering kali berhenti ketika sebuah kata telah berhasil dilabeli sebagai '*alaqah sababiyyah*', tanpa mengeksplorasi *qarinah* (indikator pembatas) dan keterhubungannya dengan konteks situasi (*siyāq al-wāqi'*) serta implikasi praktis yang ditimbulkannya ketika hadis tersebut diimplementasikan dalam struktur sosial-politik masyarakat.¹³

Mengisi celah penelitian ini menjadi sangat signifikan karena teks hadis kepemimpinan sering kali disalahpahami akibat pembacaan yang terlampau literal (*literalist-fundamentalist*). Kegagalan dalam menangkap dimensi metonimis (*Majaz Mursal*) dalam klausa-klausa politik profetik berpotensi melahirkan legitimasi teologis terhadap otoritarianisme penguasa atau, sebaliknya, memicu radikalisme politik akibat salah menafsirkan perintah ketaatan dan pemberontakan. Dengan membongkar metonimi retoris ini, hakikat kepemimpinan Islam yang humanis, adil, dan mengutamakan kemaslahatan publik dapat dieksplorasi secara objektif dan ilmiah melalui pisau analisis linguistik yang terukur.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) yang orisinal dengan melakukan integrasi interdisipliner antara Ilmu Balagh (analisis struktural *Majaz Mursal*) dengan Ilmu Politik Islam (analisis implikasi kebijakan sosiopolitical). Penelitian ini melangkah jauh melampaui sekadar

¹¹ Muhammad Syaqq Al-Azdi Bin Abd Razak dkk., "Harmonizing Faith and Governance: A Comprehensive Study of Islamic Governance Frameworks," *Jurnal Pengajian Islam* 17, no. 2 (2024): 87–101, <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i2.304>.

¹² Umdatul Hasanah, "Rhetoric in Islamic Tradition: Paradigm and Its Development," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 15, no. 2 (2021): 241–52, <https://doi.org/10.24090/komunika.v15i2.4570>.

¹³ Anisah Khoiriyah Damanik dan Februati Trimurni, "Religion Education Social Laa Roiba Journal," *Reslaj* 7 (2025): 804–13, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i9.9727>.

klasifikasi tekstual; ia mendekonstruksi mekanisme kerja metonimi retoris dalam korpus hadis-hadis kepemimpinan otoritatif (seperti *Shahih Bukhari* dan *Muslim*) dan mengekstrak nilai-nilai politik substantif yang dikandungnya. Kebaruan ini meletakkan teks hadis bukan sebagai objek teologis yang statis, melainkan sebagai wacana politik profetik yang dinamis dan memiliki struktur linguistik yang canggih untuk merespons problem tata negara.

Berdasarkan latar belakang dan kebaruan yang ditawarkan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara struktural manifestasi gaya bahasa *Majaz Mursal* dalam hadis-hadis kepemimpinan serta mengungkap implikasi politik yang terkandung di balik struktur metonimik tersebut. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ragam '*alaghah* (hubungan logika) yang digunakan Rasulullah saw. dalam mendesain wacana pemerintahan, serta membedah bagaimana indikator kebahasaan (*qarinah*) mencegah distorsi makna literal yang dapat merusak tatanan hubungan sosiopolitik antara penguasa dan warga negara.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi substansial bagi rekonstruksi metodologi kajian hadis dan linguistik Arab. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala Ilmu Bayan, khususnya teori *Majaz Mursal*, dengan membuktikan eksistensi dan efektivitas fungsinya dalam wilayah wacana nonsastra murni, yaitu wacana politik dan hukum tata negara. Selain itu, penelitian ini menawarkan model pendekatan baru—yaitu *Rhetorical-Political Analysis*—yang dapat diadopsi oleh para peneliti masa depan untuk mengkaji teks-teks keagamaan klasik dengan mengaitkan struktur mikro-kebahasaan pada dampak makro-sosial.

Secara praktis, kontribusi penelitian ini diarahkan sebagai panduan akademik bagi para pemikir politik Islam, mubalig, dan pengambil kebijakan dalam memahami khazanah politik profetik secara kontekstual dan inklusif. Temuan penelitian ini dapat mereduksi politisasi agama yang berbasis pada pembacaan hadis-hadis kepemimpinan secara prasial dan literal. Lebih jauh lagi, artikel ini menyajikan rekonstruksi etika kepemimpinan yang dapat diadopsi dalam perumusan tata kelola pemerintahan modern yang bersih, transparan, dan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas publik sebagaimana yang dicontohkan dalam retorika profetik.

Mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dipandu oleh tiga pertanyaan penelitian (*research questions*) yang mendasar. Pertama, bagaimana klasifikasi struktural dan karakteristik variasi '*alaghah* (hubungan logika) dalam *Majaz Mursal* yang termaktub di dalam korpus hadis-hadis kepemimpinan? Kedua, bagaimana peran *qarinah* (indikator tekstual maupun kontekstual) dalam menjembatani pergeseran makna dari hakiki menuju majazi pada hadis-hadis kepemimpinan tersebut agar tidak menimbulkan miskonsepsi hukum politik?

Ketiga, apa saja implikasi politik substantif—termasuk di dalamnya konsep pembatasan kekuasaan, perlindungan hak sipil, dan etika birokrasi—yang dihasilkan dari dekonstruksi metonimi retoris tersebut bagi konteks tata kelola pemerintahan modern? Melalui jawaban atas ketiga pertanyaan

ini, artikel ini akan menyajikan sebuah argumen yang utuh bahwa estetika balagh dalam hadis tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berkelindan secara mutlak dengan visi sosial-politik Islam yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan fokus pada analisis struktural-hermeneutis teks.¹⁴ Pendekatan metodologis yang digunakan berakar pada Ilmu Balagh klasik, khususnya pada cabang Ilmu Bayan yang mengkaji *Majaz Mursal* (metonimi retoris). Kerangka linguistik tersebut diintegrasikan secara interdisipliner dengan Analisis Wacana Politik Profetik guna memetakan bagaimana pergeseran makna pada tingkat mikro-linguistik dalam teks mampu menghasilkan implikasi makro-politik di ruang publik. Pendekatan strukturalis diterapkan untuk membedah mekanisme internal teks, yaitu dengan mengurai keterhubungan antara komponen makna hakiki (literal) dan majazi (kiasan) tanpa memisahkan teks dari konteks situasional saat hadis tersebut disabdakan (*siyāq al-wāqi'*).¹⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab hadis kanonik, dengan fokus utama pada *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Kedua kompendium hadis ini dipilih karena memiliki otoritas epistemologis tertinggi dan validitas tekstual yang paling diakui dalam tradisi akademik Islam. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* berdasarkan relevansi tematik (*Hadits al-Imarah*). Kriteria inklusi untuk pemilihan korpus data ditetapkan secara ketat sebagai berikut: (1) Hadis-hadis yang secara eksplisit membahas tema kepemimpinan (*imarah*), kekuasaan (*sultan*), tanggung jawab publik (*ra'iyah*), serta kepatuhan atau perlawanan politik; (2) Teks hadis yang memuat karakteristik struktur *Majaz Mursal* berdasarkan standardisasi para teoretikus balagh klasik seperti Abdul Qahir al-Jurjani dan Al-Qazwini.¹⁶ Melalui proses penyaringan terhadap bab-bab tata negara (*Kitab al-Imarah/al-Ahkam*) pada kedua sumber primer tersebut, diperoleh korpus final sebanyak 5 hadis perwakilan. Ukuran sampel ini dinilai memadai dan telah mencapai titik jenuh teoritis (*theoretical saturation*) karena telah mewakili seluruh variasi utama turunan hubungan logika (*'alaqah*) dalam *Majaz Mursal*.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan ekstraksi teks secara manual tanpa intervensi lapangan. Prosedur pengumpulan data dijalankan melalui empat tahapan sistematis

¹⁴ Khairil Ikhsan Siregar, "Hermeneutika Hadis tentang 'Hidupkan Saya Bersama Orang Miskin.'" (Analisis Kualitas dan Sharh Hadis)," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 1 (2021): 111–28.

¹⁵ Sultan Gholand Astapala, "Pemahaman Hadis Eskatologi Perspektif Teori Strukturalisme : Pendekatan Mongin Ferdinand De Saussure," *PENGELOLA JURNAL ILMIAH NASIONAL MANTHIQ: JURNAL FILSAFAT AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 2025, 196–208.

¹⁶ Salsabila Itsnaini dkk., "Penerapan Studi Hadis Tematik di Bidang Politik dan Ketatanegaraan," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 238–50.

untuk menjamin transparansi penelitian. Pada tahap identifikasi, peneliti menyisir seluruh teks dalam bab kepemimpinan pada kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* untuk menemukan sabda-sabda Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan struktur sosiopolitik. Pada tahap isolasi, klausa atau kalimat yang telah diidentifikasi kemudian dipindai secara manual guna memisahkan frasa-frasa yang mengalami anomali linguistik, di mana kata yang digunakan bergeser dari makna aslinya (*al-ma'na al-haqiqi*). Selanjutnya, pada tahap verifikasi, teks yang telah diisolasi dikonfirmasi melalui kitab-kitab *syarah hadis* otoritatif, terutama *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-Asqalani dan *Syarah Shahih Muslim* karya Imam an-Nawawi, untuk mengonfirmasi konteks historis (*asbab al-wurud*), makna lafaz, serta indikasi kebahasaan yang menunjukkan penggunaan majaz.¹⁷ Akhirnya, pada tahap finalisasi, teks hadis yang telah terverifikasi dimasukkan ke dalam kartu data analisis (*data card index*).

Instrumen utama dalam penelitian kepustakaan kualitatif ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang bertindak sebagai perencana, pengumpul, dan analisis data. Tidak ada perangkat lunak (*software*) eksternal maupun alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁸ Sebagai gantinya, peneliti menggunakan instrumen konseptual berupa matriks analisis teks yang dikembangkan dengan mengadaptasi indikator balagh klasik untuk mengukur dua konstruk utama: (1) Mekanisme Struktural *Majaz Mursal*, yang diukur melalui indikator kata majazi yang digunakan (*al-lafzh al-majazi*), makna asal/denotatif (*al-ma'na al-asli*), hubungan logika non-keserupaan (*al-'alaqah*), dan indikator pembatas yang mencegah pemaknaan secara literal (*al-qarinah*); (2) Implikasi Politik Substantif, yang diukur melalui indikator tematik pemikiran politik Islam, seperti akuntabilitas institusional, batasan kekuasaan eksekutif, perlindungan hak-hak sipil masyarakat, dan etika birokrasi profetik.

Analisis data dilakukan secara manual menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dan dekonstruksi retoris-struktural. Prosedur analisis data dieksekusi melalui langkah-langkah hierarkis. Diawali dengan penguraian tekstual (*textual breakdown*), di mana setiap hadis dalam korpus diurai berdasarkan struktur sintaksisnya untuk menemukan posisi tepat dari penggunaan metonimi retoris.¹⁹ Langkah kedua adalah klasifikasi tipologis, di mana frasa majazi yang ditemukan diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis turunan *'alaqah*-nya yang spesifik (seperti *Sababiyyah*, *Musabbabiyyah*, *Al-Juz'iyah*, *Al-Kulliyyah*, atau *Al-Mahalliyyah*).²⁰ Langkah ketiga adalah pengodean *qarinah* (*decoding qarinah*), di mana peneliti menganalisis aspek *qarinah* untuk menjelaskan alasan

¹⁷ Mukhlis Mukhtar, *SYARH AL-HADIS DAN FIQH AL-HADIS*, 4 (2018).

¹⁸ Haydar et al Firdaus, "KOMUNIKASI PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN CITRA DESTINASI EDUKATIF: STUDI TIGA LOKASI WISATA DI JAWA TIMUR," *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi* 05, no. 04 (2025): 404–11.

¹⁹ Henri Ramdini, *Tipologi Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual*, 2023.

²⁰ Mohamad Harjum, "Majāz Mursal: Kajian Bentuk Dan Fungsi Dalam Bahasa Arab," *PINISI JOURNAL OF ART, HUMANITY & SOCIAL STUDIES* 5, no. 4 (2025): 136–44.

logis mengapa teks tersebut tidak boleh dimaknai secara harfiah.²¹ Langkah keempat berupa induksi kontekstual (pemetaan tematik), di mana makna majazi yang telah dibuka kodenya kemudian dikontekstualisasikan ke dalam teori politik untuk melihat pengaruhnya pada relasi kekuasaan. Analisis diakhiri dengan sintesis tematik untuk mengkristalisasikan seluruh temuan ke dalam narasi pembahasan.

Sebagai penelitian berbasis kepustakaan yang tidak melibatkan partisipan manusia, subjek hewan, atau intervensi lapangan yang sensitif, penelitian ini tidak memerlukan izin formal dari komite etik (*institutional review board*). Kendati demikian, integritas akademik dan etika penelitian tetap dijaga secara ketat. Penelitian ini menjamin transparansi sitasi secara mutlak untuk menghindari segala bentuk plagiarisme akademik. Seluruh teks berbahasa Arab dari sumber primer dan sekunder ditransliterasikan secara presisi dan dirujuk menggunakan standar pengutipan internasional guna menjamin akuntabilitas data sehingga dapat direplikasi dan diverifikasi ulang oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis isi dan dekonstruksi retoris yang dilakukan terhadap korpus data hadis kepemimpinan dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, penelitian ini membuktikan secara empiris eksistensi penggunaan *Majaz Mursal* (metonimi retoris) dalam wacana politik profetik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap hadis mewakili hubungan logika (*'alaqah*) yang unik dan dikunci oleh indikator pembatas semantik (*qarinah*) yang sistematis. Pemetaan struktural dari kelima data hadis perwakilan tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Matriks Klasifikasi Struktural Majaz Mursal dalam Hadis Kepemimpinan

No	Teks Hadis (Objek Utama)	Kata/Frasa Majazi	Hubungan Logika ('Alaqah)	Indikator Pembatas (Qarinah)	Target Makna Figuratif
1	وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ²² (HR. Bukhari: 2797)	<i>Al-Amir</i> (Pemimpin)	<i>Al-Juz'iyah</i>	<i>Aqliyyah</i> (Logistik)	Sistem/Aparatur Negara
2	كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ²³ (HR. Muslim : 1829)	<i>Ra'iyah</i> (Gembalaan)	<i>Al-Mahalliyyah</i>	Kontekstual (Situasional)	Warga Negara / Sipil

²¹ Andi Tri Saputra dan Interdisciplinary Islamic Studies, "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, dan Penafsiran Quraish Shihab tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)," *JURNAL AL-WAJID* Vol. 2, no. 2 (2021): 8–12.

²² Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Muṣṭafā Daib al-Bagā, vol. 3 (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1993), p. 1080

²³ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 3 (n.p.: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabīy, 1955), p. 1459

3	إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُنَاقِى بِهِ ²⁴ (HR. Bukhari: 2797)	<i>Junnah</i> (Perisai)	<i>Sababiyyah</i>	<i>Lafzhiyyah</i> (Leksikal)	Proteksi & Pertahanan Sipil
4	مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِيَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ²⁵ (HR. Muslim : 1851)	<i>Khala'a</i> <i>Yadan</i> (Lepas Tangan)	<i>Al-Kulliyyah</i>	<i>Siyāqiyyah</i> (Sintaksis)	Pembatalan Kontrak Sosial
5	اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْجِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ رَبِيبَةً ²⁶ (HR. Bukhari : 6723)	<i>Asma'u wa</i> <i>Athi'u</i> (Dengar-Taati)	<i>Musabbabiyyah</i>	<i>Aqliyyah</i> (Rasional)	Legalitas Hukum Eksekutif

Deskripsi 'Alaqah Al-Juz'iyyah (Sebagian untuk Keseluruhan)

Data pertama membuktikan adanya penggunaan struktur *Al-Juz'iyyah*, di mana teks menyebutkan suatu entitas tunggal atau bagian spesifik untuk merepresentasikan sistem kolektif yang utuh.

1. Teks Hadis:

وَمَنْ يُطِيعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي²⁷

(HR. Bukhari)

2. Deskripsi Struktural:

Frasa majazi dalam teks ini terletak pada kata "*Al-Amir*" (Pemimpin). Secara literal, kata ini merujuk pada sosok individu yang menduduki jabatan puncak. Namun, melalui mekanisme *Majaz Mursal*, kata ini digunakan untuk merujuk pada keseluruhan institusi pemerintahan, hukum yang sah, dan sistem administrasi negara.²⁸

²⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Muṣṭafā Daib al-Bagā, vol. 3 (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1993), p. 1080

²⁵ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, vol. 3 (n.p.: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-‘Arabīy, 1955), p. 1478

²⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Muṣṭafā Daib al-Bagā, vol. 6 (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1993), p. 2612

²⁷ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Muṣṭafā Daib al-Bagā, vol. 3 (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1993), p. 1080

²⁸ Raudatul Jannah Andar dkk., “Penerapan Kaidah Majaz Mursal dalam Al-Qur’an (Kajian Balagh Mengetahui Struktur dan Fungsinya dalam Penafsiran al-Qur’an),” *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2025): 74–88.

3. Mekanisme Qarinah:

Struktur ini dikunci oleh *Qarinah Aqliyyah (Logistik)*. Secara logis-struktural, ketaatan sipil tidak mungkin ditujukan pada kepribadian fisik seorang individu (*Al-Amir*), melainkan pada sistem aturan dan kebijakan publik yang dijalankan oleh lembaga kepemimpinan tersebut.

Deskripsi 'Alaqah Al-Mahalliyyah (Tempat untuk Penghuni)

Data kedua membuktikan eksistensi *Al-Mahalliyyah*, sebuah konstruksi di mana tempat, wadah, atau domain spasial digunakan untuk merujuk pada subjek manusia yang berada di dalamnya.

1. Teks Hadis:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ²⁹

(HR. Muslim)

2. Deskripsi Struktural:

Kata majazi yang ditemukan adalah "*Ra'iyyatihi*". Secara etimologis, *Ra'iyyah* berarti hewan ternak yang berada di wilayah penggembalaan (spasial). Dalam konteks hadis kepemimpinan ini, terjadi pergeseran makna di mana domain wilayah/hewan tersebut digunakan untuk menyebut masyarakat, warga negara, atau manusia yang dipimpin.

3. Mekanisme Qarinah:

Teks ini menggunakan *Qarinah Kontekstual (Situasional)*. Kehadiran kata *Kullukum* (setiap kalian) dan *Mas'ul* (dimintai pertanggungjawaban di akhirat) secara otomatis menolak makna hakiki/literal, karena hewan ternak tidak memiliki beban moral hukum (*mukallaḥ*) untuk dimintai pertanggungjawaban teologis.

Deskripsi 'Alaqah Sababiyyah (Sebab untuk Akibat)

Data ketiga membuktikan fungsi *Sababiyyah*, yaitu penyebutan suatu instrumen atau faktor pemicu (*sabab*) untuk memproyeksikan dampak atau hasil akhir (*akibat*) yang ditimbulkannya.

1. Teks Hadis:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ³⁰

(HR. Bukhari)

²⁹ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 3 (n.p.: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabīy, 1955), p. 1459

³⁰ Abdul Fattah Idris, "HADIS PREDIKTIF DALAM KITAB AL-BUKHARI," *Jurnal THEOLOGIA* 24, no. 1 (2016): 285–306, <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.325>.

2. Deskripsi Struktural:

Kata majazi dalam hadis ini adalah "*Junnah*" (perisai fisik dari besi/kayu). Rasulullah menyamakan posisi pemimpin (*Al-Imam*) dengan perisai. Perisai adalah *sebab* atau alat mekanis yang menghasilkan *akibat* berupa rasa aman, perlindungan hukum, dan pertahanan kedaulatan negara.³¹

3. Mekanisme Qarinah:

Struktur ini diidentifikasi melalui *Qarinah Lafzhiyyah (Leksikal)*. Subjek kalimat adalah *Al-Imam* (manusia), yang secara tata bahasa dan fisik mustahil berubah wujud menjadi benda mati berupa tameng atau perisai perang. Maka, makna literalnya gugur.³²

Deskripsi 'Alaqah Al-Kulliyah (Keseluruhan untuk Sebagian)

Data keempat menunjukkan adanya bentuk *Al-Kulliyah*, yang merupakan kebalikan dari *Al-Juz'iyyah*, di mana kata yang bermakna totalitas digunakan untuk menyatakan tindakan yang sifatnya parsial atau sebagian.³³

1. Teks Hadis:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ

(HR. Muslim)

2. Deskripsi Struktural:

Frasa majazi yang diuji adalah "*Khala'a Yadan*" (mencopot/melepaskan tangan). Teks menyebutkan organ tangan secara utuh (*al-kull*) untuk merepresentasikan sebuah tindakan parsial berupa pengingkaran atau pembatalan sepihak terhadap komitmen janji setia (*bay'ah*) atau kepatuhan hukum.

3. Mekanisme Qarinah:

Indikator pembatasnya berbentuk *Qarinah Siyāqiyah (Sintaksis)*. Hubungan kalimat (*siyāq*) yang menyambungkan kata "melepaskan tangan" dengan frasa abstrak *min tha'atin* (dari

³¹ Asep Saepudin, "Analisis Hadis-Hadis tentang Taat Kepada Pemimpin Implikasi dalam Kehidupan Bernegara," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 53–62, <https://doi.org/10.58540/isihumor.v2i2.678>.

³² Nasimah Abdullah dan Saifulah Samsudin, "Perbandingan penterjemahan Majāz Mursal al-Quran antara Yayasan Restu dengan al-Hidayah House of Quran," *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 7, no. 2 (2022): 949–61, <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v7i2.298>.

³³ Eli Sabrifha dkk., "Typology of Learning The Meaning of Hadith on Yusuf Al-Qaradhawiy Perspective," *Ambarsa : Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 100–116, <https://doi.org/10.59106/abs.v2i2.77>.

ketaatan) menegaskan bahwa tindakan yang dimaksud bukanlah amputasi fisik tangan, melainkan penarikan komitmen politik dari sebuah sistem hukum.³⁴

Deskripsi 'Alaqah Musabbabiyyah (Akibat untuk Sebab)

Data kelima membuktikan adanya variasi struktur *Musabbabiyyah*, di mana teks menonjolkan konsekuensi perilaku atau kondisi akhir (*akibat*) untuk memerintahkan kepatuhan terhadap regulasi hulu (*sebab*).

1. Teks Hadis:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

(HR. Bukhari)

2. Deskripsi Struktural:

Frasa majazi yang didekonstruksi adalah "*Asma'u wa Athi'u*" (Dengar dan Taat). Aktivitas mendengar dan menaati adalah wujud empiris yang tampak (*akibat*) di hilir. Sementara target makna yang sebenarnya diinginkan oleh teks adalah pengakuan legalitas kepemimpinan dan validitas konstitusi (*sebab*) yang dibawa oleh pemimpin tersebut.³⁵

3. Mekanisme Qarinah:

Teks ini dikunci oleh *Qarinah Aqliyyah (Rasional)*. Nalar logis menunjukkan bahwa perintah "mendengar dan menaati" tidak mungkin mewujudkan tanpa adanya stimulus sosiopolitik terlebih dahulu, yaitu berupa penerbitan kebijakan, undang-undang, atau maklumat resmi dari otoritas yang berwenang.

Pembahasan

Temuan utama penelitian ini membuktikan secara konseptual bahwa *Majaz Mursal* (metonimi retoris) di dalam hadis-hadis kepemimpinan (*Hadiths on Governance*) bukan sekadar sebuah fenomena linguistik yang bertujuan estetis. Lebih jauh dari itu, metonimi retoris berfungsi sebagai sebuah instrumen kognitif-politis yang mengonstruksi ulang cara pandang teologis atas relasi kekuasaan. Melalui kelima bentuk *'alaqah* yang didekonstruksi pada bagian hasil, Rasulullah saw. secara konsisten menggeser unit-unit kata literal yang berpotensi melahirkan kultus individu atau tirani personal, menuju struktur makna baru yang menekankan pada sistem, keterwakilan sipil, dan akuntabilitas hukum.

³⁴ Uyun Thayyibah dkk., "MAJAZ DALAM PUISI 'ASYHADU AN LÂ IMRA'AN ILLÂ ANTI' KARYA NIZAR QOBBANI," *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab L-DHAD* 4, no. 01 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.54892/jpbal-dhad.v4i01.627>.

³⁵ Mira Fauziah, "Principles of Listening in The Quran and Their Development in Islamic Preaching: A Study of Surah Al-Nahl/16:78," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 20, no. 2 (2023): 361, <https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.19452>.

Keberadaan *qarinah* (indikator pembatas) yang sangat ketat pada setiap teks menjadi katup pengaman semantik agar pesan-pesan politik profetik tidak mengalami distorsi makna yang membahayakan stabilitas tatanan sosiopolitik umat manusia.³⁶

Pada temuan '*alagh al-juz'iyah* dalam kata *al-amir* pada hadis riwayat Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, No. 7137, serta Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, No. 1835, makna konseptual yang muncul menunjukkan adanya institusionalisasi kekuasaan. Ketika teks menyatakan bahwa menaati pemimpin berarti menaati Rasul, struktur metonimi ini sedang melepaskan ego personalitas dari sosok biologis pemimpin tersebut. Berdasarkan teori balagh klasik yang dirumuskan oleh Abdul Qahir al-Jurjani dalam *Asrar al-Balaghah*, penyebutan sebagian (*al-juz*) yang dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan (*al-kull*) hanya absah jika bagian yang disebut memiliki fungsi vital yang tidak terpisahkan dari totalitasnya. Dalam wacana politik, figur *Al-Amir* adalah simbol hulu dari sebuah sistem tata negara; dengan demikian, kepatuhan sipil yang dituntut bukan diarahkan kepada kepentingan personal sang penguasa, melainkan kepada sistem hukum, stabilitas birokrasi, dan kemaslahatan publik yang direpresentasikannya.³⁷

Jika dikomparasikan dengan literatur balagh klasik dalam 10 tahun terakhir, temuan ini memperluas batasan teoretis yang pernah diajukan oleh para sarjana sastra Arab konvensional. Mayoritas studi balagh tradisional cenderung menempatkan *Majaz Mursal* sebagai variasi retorika tekstual murni yang mandek pada pelabelan hubungan bahasa. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Sa'd al-Din al-Taftazani dalam *Al-Mukhtashar* yang memandang bahwa penggunaan majaz tidak semata-mata merupakan variasi linguistik, tetapi juga sarana retoris untuk memperdalam efek makna dan memperkuat daya pengaruh bahasa terhadap audiens. Kebaruan artikel ini terletak pada keberhasilannya mentransformasikan rahasia psikologis sastra tersebut menjadi instrumen analisis wacana kritis politik (*critical political discourse*), sebuah dimensi yang luput dari perhatian para ahli balagh klasik.³⁸

Selanjutnya, pemaknaan terhadap '*alagh Al-Mahalliyyah* pada kata *Ra'iyah* dalam hadis riwayat Muslim, Kitab al-Imarah, No. 1829 secara radikal mengubah arah perdebatan mengenai kedaulatan dalam Islam.³⁹ Istilah *Ra'iyah* yang secara etimologis berakar pada domain pastoral hewan

³⁶ Mohamad Hussin dkk., "Pendekatan Kinayah dalam Komunikasi Rasulullah SAW," *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 8, no. 2 (2023): 1178–92, <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v8i2.406>.

³⁷ Muhammad Rizky Silaban, "Ulil Abshar Abdalla's Criticism of the Caliphate Concept of Hizbut Tahrir in Indonesia," *Islamic Thought Review* 1, no. 1 (2023): 33, <https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6411>.

³⁸ Muhammad Afthon Ulin Nuha dan Nurul Musyafaah, "Majaz Isti'arah Analysis Terms of Mulaim in Arabic Oral Perspective," *LISANUDHAD: JURNAL BAHASA, PEMBELAJARAN DAN SASTRA ARAB* 9, no. 2 (2022): 164, <https://doi.org/10.21111/lisanudhad.v9i2.8909>.

³⁹ Zakir Aras dan Sohirin Mohammad Solihin, "Political Exegesis of the Holy Quran: A Rational and Critical vision," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (2022): 287–314, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.287-314>.

ternak digeser untuk menunjuk masyarakat manusia.⁴⁰ Dalam kajian linguistik *kognitif kontemporer*, George Lakoff dan Mark Johnson melalui Teori Metafora Konseptual (Conceptual Metaphor Theory) menjelaskan bahwa metafora bukan sekadar ornamen bahasa, melainkan mekanisme berpikir yang membentuk cara manusia memahami realitas. Rasulullah saw. meminjam ranah domestikasi penggembalaan bukan untuk merendahkan martabat manusia setara dengan hewan, melainkan untuk mentransfer muatan tanggung jawab proteksi mutlak.⁴¹ Pemimpin diposisikan bukan sebagai pemilik absolut, melainkan sebagai pelayan yang memikul kewajiban ekologis untuk menjaga, memberi makan, dan mengayomi subjek hukum yang berada di dalam wilayah kekuasaannya.⁴²

Temuan *Al-Mahalliyyah* ini secara konseptual bertentangan dengan beberapa literatur fikih siyasah kontemporer beraliran literalis-fundamentalis yang ditulis dalam dekade terakhir. Kelompok literalis sering kali mengeksploitasi kata *Ra'iyah* dan teks kepemimpinan secara umum untuk mengonstruksi doktrin kepatuhan buta (*blind obedience*) rakyat kepada penguasa layaknya hewan ternak kepada pemiliknya. Argumen logis hasil penelitian ini mendebrak bias tersebut; keberadaan *Qarinah Kontekstual* berupa beban pertanggungjawaban teologis akhirat (*mas'ul*) membuktikan bahwa kedudukan rakyat (manusia) dalam teks tersebut memiliki hak sipil substantif yang dilindungi oleh hukum ilahi. Hasil penelitian ini justru memperluas kajian sosiopolitik Islam dengan menegaskan bahwa rakyat adalah mitra kritis negara, bukan objek eksploitasi kekuasaan.

Pada analisis *'alaqah Sababiyyah* terkait diksi *Junnah* atau perisai dalam hadis riwayat al-Bukhari, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, No. 2957, makna teoretis yang terpancar adalah fungsionalisasi kepemimpinan sebagai instrumen pertahanan kedaulatan. Dalam tinjauan balagh klasik oleh Al-Sakkaki dalam *Miftah al-'Ulum*, hubungan kausalitas (*sababiyyah*) digunakan ketika pembicara ingin menekankan bahwa eksistensi akibat sangat bergantung pada kesiapan sebabnya.⁴³ Dengan menyebut *Al-Imam* sebagai *Junnah*, wacana profetik meletakkan kriteria utama legitimasi politik: seorang pemimpin hanya diakui jika ia mampu berfungsi sebagai tameng yang memberikan proteksi keamanan, keadilan hukum, dan perlindungan hak asasi bagi rakyatnya. Jika seorang pemimpin gagal menjadi perisai dan justru bertindak sebagai pedang yang melukai rakyatnya sendiri, maka secara retorik-struktural ia telah kehilangan esensi ke-imam-annya.

Dari perspektif semantik kontemporer model Toshihiko Izutsu, pergeseran kata *Junnah* dari medan semantik militer murni menuju medan semantik tata negara merupakan wujud *worldview*

⁴⁰ Supriyanto Supriyanto, "Religion and State in the Perspective of Islamic Thought," *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 11, no. 2 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1469>.

⁴¹ Hady J. Hamdan dkk., "Connotations of Animal Metaphors in the Jordanian Context," *PSYCHOLINGUISTICS* 33, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31470/2309-1797-2023-33-1-132-166>.

⁴² Muhammad Arsyad dan Noor Hasanah, *NILAI EKOLOGIS ISLAM: KONSEP KHALIFAH DAN AMANAH*, 4, no. 1 (2025).

⁴³ Abdullah Yildirim, *MİFTÂHU'L-ULÛM'DA İLMÛ'L-EDEB KAVRAYIŞI*, 8, no. 2 (2022).

(pandangan dunia) Islam yang revolusioner.⁴⁴ Kepemimpinan dalam Islam diisi oleh nilai proteksi humanistik. Temuan ini merevisi pandangan beberapa pengamat politik barat sekuler yang menyatakan bahwa konsep kepemimpinan politik Islam awal berorientasi pada ekspansi militer agresif (*offensive warfare*).⁴⁵ Struktur *Majaz Mursal Sababiyyah* ini membuktikan sebaliknya: orientasi utama kekuasaan politik profetik bersifat defensif dan protektif (*defensive-protective*), bertujuan menciptakan stabilitas domestik yang aman demi tegaknya keadilan sosial.

Analisis terhadap *'alaqah Al-Kulliyyah* pada frasa *Khala'a Yadan* (HR. Muslim, No. 1851) memberikan kontribusi teoretis yang sangat berharga bagi pelurusan konsep "pemberontakan" (*al-khuru' 'ala al-aimmah*). Teks menyebutkan tindakan melepaskan tangan secara keseluruhan (*al-kull*) untuk maksud pengingkaran sebagian ketaatan (*al-juz*). Secara sastra, idiom ini mengisyaratkan sebuah tindakan makro yang dramatis. Dalam diskursus politik modern, tindakan melepaskan tangan ini setara dengan pemutusan kontrak sosial (*social contract*) secara sepihak.⁴⁶ Rasulullah saw. memperingatkan dampak teologis yang berat bagi pelakunya bukan karena Islam anti-kritik, melainkan karena pemutusan kontrak sosial secara anarkis dan sepihak tanpa jalur konstitusional akan meruntuhkan tertib sosial (*social order*) dan memicu perang saudara yang destruktif bagi peradaban.

Temuan *Al-Kulliyyah* ini melangkah lebih jauh dibandingkan dengan kajian hermeneutika hadis yang dilakukan oleh sarjana modern seperti Fazlur Rahman atau Nasr Hamid Abu Zayd.⁴⁷ Meskipun kedua tokoh tersebut menawarkan pembacaan kontekstual, mereka jarang menyentuh aspek mekanika *Majaz Mursal* sebagai struktur pembentuk teks politik. Dengan membongkar fungsi *Qarinah Practical* (sintaksis) yang mengikat kata *yadan* dengan *min tha'atin*, artikel ini berhasil membuktikan bahwa yang dilarang oleh Nabi adalah delegitimasi sistem hukum secara total yang mengarah pada anarki, bukan kritik konstruktif terhadap kebijakan eksekutif yang keliru. Hal ini memperkaya literatur dengan menjembatani titik temu antara hukum tata negara Islam dengan prinsip stabilitas nasional modern.

Terakhir, pada *'alaqah Musabbabiyyah* dalam perintah *Asma'u wa Athi'u* terhadap budak Etiopia Hadis riwayat al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, No. 7142, pemaknaan yang lahir adalah prinsip konstitusionalisme dan egalitarianisme politik yang absolut. Dengan mengeksplorasi akibat (mendengar dan taat) untuk memerintahkan sebab (penerimaan atas legalitas konstitusi), teks ini meruntuhkan sekat-sekat primordialisme, rasialisme, dan kasta sosial dalam kepemimpinan politik. Balagh kontemporer

⁴⁴ Mohammad Rizal Nur Rochim dkk., "The Meaning of the Word 'Wazir' in the Qur'an: A Semantic Analysis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 20, no. 2 (2023): 385, <https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.20205>.

⁴⁵ Maulidiah Amalina Rizqi dan Abdul Kadir Alamudi, "Analisis Kepemimpinan Islami pada Era Modern," *Jurnal Manajerial* 12, no. 02 (2025): 315–31, <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v12i02.9782>.

⁴⁶ Siti Elmira Jonteng dkk., "IMEJ PERLAMBAHAN 'TANGAN' DALAM SIMPULAN BAHASA MELAYU: ANALISIS SEMANTIK INKUISITIF," *Asian People Journal (APJ)* 4, no. 1 (2021): 108–31, <https://doi.org/10.37231/apj.2021.4.1.261>.

⁴⁷ Winda Islamitha Nurhamidah dkk., "Pendekatan Hermeneutik dalam Pengkajian Hadis: Analisis Pemaknaan Hadis Tentang Peran Perempuan di Ranah Publik," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 166–77, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v3i3.7329>.

menilai bahwa penggunaan efek (*musabbab*) dalam sebuah instruksi bertujuan untuk memberikan tekanan psikologis instan kepada audiens agar fokus pada hasil akhir tindakan.⁴⁸ Hal ini menandakan bahwa kepatuhan politik dalam Islam bersifat impersonal dan objektif; ia melekat pada validitas hukum dan penegakan keadilan, bukan pada warna kulit atau latar belakang sosial sang penguasa.

Secara teoretis, keseluruhan hasil penelitian ini memberikan implikasi rekonstruktif yang masif bagi pengembangan Ilmu Balaghah secara interdisipliner. Penelitian ini berhasil meruntuhkan tembok pemisah yang selama ini mengisolasi Ilmu Bayan di dalam menara gading estetika sastra Arab murni. Temuan ini membuktikan bahwa teori-teori hubungan metonimik dalam *Majaz Mursal* memiliki kapasitas metodologis yang sangat operasional untuk digunakan sebagai pisau analisis wacana kritis-politik (*political discourse analysis*). Kebaruan teoretis ini menawarkan sebuah paradigma baru bernama "Metonimi Politis Profetik", yang memandang gaya bahasa kiasan sebagai strategi komunikasi politik tingkat tinggi untuk menanamkan ideologi kemaslahatan publik secara persuasif.

Bagi studi hadis (*Ulumul Hadith*), implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan metodologi syarah hadis berbasis linguistik-struktural. Selama ini, kajian kontekstualisasi hadis sering kali dituduh mengabaikan teks demi mengejar konteks historis. Penelitian ini membuktikan bahwa tanpa keluar dari teks—melainkan dengan masuk sedalam-dalamnya ke dalam struktur mekanis *majaz* dan mencari *qarinah*-nya—makna hadis yang kontekstual, humanis, dan adil justru dapat ditemukan secara valid dan objektif. Ini menjadi model baru bagi para sarjana hadis internasional dalam melakukan dekonstruksi teks-teks keagamaan klasik tanpa terjebak pada spekulasi hermeneutika yang liar.

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi krusial bagi gerakan moderasi beragama dan edukasi politik publik di dunia Islam. Dengan menyajikan pemaknaan yang de-literal terhadap hadis-hadis kepemimpinan, artikel ini menyediakan amunisi akademik yang solid untuk mendonstruksi narasi radikalisme politik dan kelompok ekstrimis yang sering menyalahgunakan teks *Hadits al-Imarah* demi kepentingan propaganda mereka.⁴⁹ Masyarakat sipil dapat diajak untuk memahami bahwa ketaatan politik dalam Islam adalah ketaatan yang berbasis pada supremasi hukum dan keadilan sosial, bukan ketundukan membabi buta kepada individu penguasa.

Bagi para pemangku kebijakan, institusi keagamaan, dan pembuat regulasi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, penelitian ini menawarkan kerangka etika birokrasi yang luhur. Konsep kepemimpinan sebagai *Junnah* (perisai) dan kedaulatan rakyat sebagai *Ra'iyah* (amanah pastoral) dapat diintegrasikan ke dalam perumusan kode etik kepemimpinan nasional dan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*).⁵⁰ Lembaga-lembaga fatwa keagamaan dapat

⁴⁸ Fatulloh Saleh, "Teori Formalisme – Balaghah," *Buletin Al-Turas* 20, no. 1 (2020): 147–58, <https://doi.org/10.15408/bat.v20i1.3753>.

⁴⁹ Nurul Ashfiya Farhanah, "Menangkal Radikalisme dalam Hadis tentang Perintah Perang melalui Reinterpretasi Kontekstual," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 272–84, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14566>.

⁵⁰ Muhammad Iqbal dan Ridwan Ridwan, "Examining A Reintegration of Islamic Values toward Good Islamic Governance," preprint, 10 November 2025, <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7555946/v1>.

menggunakan model pendekatan analitis ini untuk merumuskan panduan hubungan sipil-negara yang lebih harmonis, demokratis, dan taat pada prinsip akuntabilitas publik.

Melihat peta diskursus akademik internasional, penelitian ini menempati posisi strategis di persimpangan jalan antara *Islamic Studies*, *Political Linguistics*, dan *Middle Eastern Rhetoric*. Artikel ini mengisi kekosongan literatur internasional yang jarang mengkaji khazanah hadis menggunakan pendekatan strukturalis sastra Arab asli (*Balaghah*) yang dipadukan dengan teori politik kontemporer.⁵¹ Posisi penelitian ini tidak sekedar mengejar pada teori-teori linguistik barat seperti dekonstruksionisme Derrida atau analisis wacana Foucault, melainkan memosisikan teori balagh klasik milik Al-Jurjani sebagai mitra dialog sejajar yang memiliki ketajaman analitis yang sama kuatnya dalam membedah teks politik.

Kontribusi nyata artikel ini terhadap ranah pemaknaan hadis terletak pada keberhasilannya membebaskan korpus *Hadits al-Imarah* dari stagnasi makna abad pertengahan. Penelitian ini membuktikan bahwa teks hadis memiliki fleksibilitas semantik yang sangat tinggi berkat keberadaan struktur majaznya. Artikel ini menggeser paradigma pembacaan hadis kepemimpinan dari yang semula berwajah monolitik, dogmatis, dan bercorak kekhalifahan sentris, menjadi wacana universal yang kompatibel dengan nilai-nilai konstitusionalisme modern, penegakan hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum (*rule of law*).

Meskipun penelitian ini secara ajeg berargumen bahwa penggunaan *Majaz Mursal* berorientasi pada fungsionalisasi sistem hukum, terdapat kemungkinan penjelasan alternatif yang perlu dipertimbangkan secara kritis. Dari sudut pandang historis-filologis, pemilihan diksi seperti *Junnah* (perisai) atau *Ra'iyah* (gembalaan) oleh Rasulullah saw. bisa jadi dipengaruhi secara murni oleh keterbatasan leksikal sosio-kultural masyarakat Arab abad ke-7 yang bersifat nomadik-pastoral dan tribal.⁵² Penjelasan alternatif ini mengasumsikan bahwa Nabi menggunakan kata-kata tersebut semata-mata karena itulah idiom yang paling familiar di telinga audiens Arab saat itu, tanpa ada intensi awal untuk menyusun sebuah cetak biru teori politik makro yang canggih.⁵³

Namun, refleksi kritis terhadap penjelasan alternatif tersebut menunjukkan kelemahannya jika kita melihat keteraturan struktur *qarinah* yang mengunci setiap teks hadis. Jika penggunaan kata tersebut hanya karena faktor keterbatasan bahasa tribal, maka teks-teks tersebut akan runtuh ketika dihadapkan pada uji logika rasional (*qarinah aqliyyah*). Fakta bahwa setiap hadis dalam korpus ini memiliki

⁵¹ Muhammad Taufiq Firdaus dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, "INTEGRASI KEILMUAN DALAM KRITIK MATAN HADIS," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2020): 153–76, <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i2.96>.

⁵² Ahmad Agis Mubarak, "Sejarah Sosial-Politik Arab: Dari Hegemoni Romawi-Persia Hingga Kebangkitan Arab Islam," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): 64–76, <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i1.1879>.

⁵³ Zen Revista dan 10 HISTORY, *Beyond the Tribe: Muhammad's Prophetic Statecraft and the Forging of Rashidun Dominion*, 2 Desember 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17788903>.

mekanisme pertahanan semantik yang kokoh yang menolak pembacaan literal membuktikan bahwa ada kesengajaan retoris (*rhetorical intentionality*) dari Nabi sebagai seorang komunikator ulung untuk melahirkan makna lapis kedua yang visioner melampaui zaman keberadaan fisik beliau.

Peneliti menyadari adanya beberapa batasan interpretasi di dalam artikel ini yang patut digarisbawahi. Pertama, penelitian ini membatasi objek kajiannya hanya pada 5 hadis perwakilan yang bersumber dari dua kitab sahih (*Bukhari dan Muslim*). Walaupun kelima hadis ini merupakan pilar utama wacana tata negara Islam, pembatasan ini belum mampu memproyeksikan lanskap gaya bahasa metonimi dalam seluruh spektrum literatur hadis yang tersebar di kitab-kitab *Sunan* dan *Musnad* yang memiliki variasi transmisi teks yang lebih beragam. Kedua, analisis ini sangat bergantung pada teks tertulis (*written text*) dan berpotensi mengabaikan unsur-unsur performatif non-verbal (seperti intonasi suara atau gestur tubuh Nabi) yang mengiringi penyampaian hadis tersebut di masa lalu.

Sebagai penutup bagian diskusi, batasan-batasan di atas justru membuka jalan lebar bagi agenda riset masa depan. Para peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas korpus data dengan melibatkan hadis-hadis kepemimpinan berkategori *daif* atau *masyhur* untuk melihat apakah ada pola pergeseran struktur *Majaz Mursal* yang berbeda. Riset masa depan juga dapat mengintegrasikan pendekatan balagh ini dengan teori pragmatik modern, seperti *Speech Act Theory* (Teori Tindak Tutur), guna mengeksplorasi daya ilokusi dan perlokusi dari metonimi politik profetik dalam memengaruhi perilaku kepatuhan dan resistensi masyarakat di ruang publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris dan teoretis bahwa *Majaz Mursal* (metonimi retoris) merupakan struktur kebahasaan yang inheren dan strategis dalam pembentukan wacana politik profetik. Melalui dekonstruksi terhadap lima hadis kepemimpinan utama, ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah saw. secara konsisten memanfaatkan variasi hubungan logika (*'alaqah*)—baik *Al-Juz'iyah*, *Al-Mahalliyyah*, *Sababiyyah*, *Al-Kulliyyah*, maupun *Musabbabiyyah*—untuk menggeser pemaknaan kekuasaan dari yang bersifat harfiah dan egosentris menuju prinsip-prinsip ketatanegaraan yang substantif. Eksistensi *qarinah* yang ketat pada setiap teks secara otomatis membatalkan pembacaan literal, sehingga menjamin bahwa doktrin politik Islam berorientasi pada institusionalisasi sistem hukum, perlindungan hak-hak sipil, egalitarianisme, dan pemenuhan fungsi proteksi keamanan bagi masyarakat.

Kontribusi ilmiah utama dari artikel ini terletak pada perumusan paradigma interdisipliner "Metonimi Politis Profetik" yang berhasil mendobrak dikotomi tradisional antara keindahan sastra Balagh dengan kepraktisan Fikih Siyasah. Secara teoretis, penelitian ini memperluas fungsionalisasi Ilmu Bayan ke dalam wilayah analisis wacana kritis politik internasional, sekaligus memperkuat metodologi syarah hadis berbasis linguistik-struktural. Secara praktis, pemaknaan kontekstual-

metonimik yang dihasilkan artikel ini memberikan kontribusi nyata bagi gerakan moderasi beragama dengan mendonstruksi klaim-klaim politik kaum literalis-radikal. Keterbatasan penelitian yang terfokus pada lima hadis dalam *Shahihain* membuka peluang besar bagi riset masa depan untuk mengeksplorasi korpus hadis sosiopolitical yang lebih luas menggunakan integrasi pendekatan pragmatik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Razak, Muhammad Syaqq Al-Azdi Bin, Sharifah Hayaati Syed Ismail, dan Siti Arni Basir. "Harmonizing Faith and Governance: A Comprehensive Study of Islamic Governance Frameworks." *Jurnal Pengajian Islam* 17, no. 2 (2024): 87–101. <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i2.304>.
- Abdullah, Nasimah, dan Saifulah Samsudin. "Perbandingan penterjemahan Majāz Mursal al-Quran antara Yayasan Restu dengan al-Hidayah House of Quran." *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 7, no. 2 (2022): 949–61. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v7i2.298>.
- Afifi, Abdullah, dan Edi Komarudin. "Metafora Al-Qur'an: Majaz Mursal dalam Surat Asy-Syu'ara." *Jurnal Ilmiah>Nama Jurnal* 1, no. 4 (2021): 497–502.
- Ahmad, Hishomudin, Norfarhana Ahmad Ghafar, Muhammad Anwar Bin Ahmad, dan Ku Mohd Syarbaini Bin Ku Yaacob. "Hadis Amalan Terbaik Dalam Sahih Bukhari: Analisa Stilistik Fonosemantik." *Journal of Hadith Studies* 9, no. 1 (2024): 144–55. <https://doi.org/10.33102/johs.v9i1.295>.
- AlAjmi, Mashael. "A Cognitive Study of Metaphors in the Glorious Qur'an: From a Linguistic to a Conceptual Approach." *Arab World English Journal for Translation and Literary Studies* 3, no. 2 (2019): 114–21. <https://doi.org/10.24093/awejtls/vol3no2.10>.
- Andar, Raudatul Jannah, Achmad Abubakar, Muhammad Irham, dkk. "Penerapan Kaidah Majaz Mursal dalam Al-Qur'an (Kajian Balagh Mengetahui Struktur dan Fungsinya dalam Penafsiran al-Qur'an)." *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2025): 74–88.
- Aras, Zakir, dan Sohirin Mohammad Solihin. "Political Exegesis of the Holy Quran: A Rational and Critical Vision." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (2022): 287–314. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.287-314>.
- Arsyad, Muhammad, dan Noor Hasanah. "Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah." *Jurnal Ilmiah>Nama Jurnal* 4, no. 1 (2025).
- Saepudin, Asep. "Analisis Hadis-Hadis tentang Taat Kepada Pemimpin Implikasi dalam Kehidupan Bernegara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 53–62. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v2i2.678>.
- Astapala, Sultan Gholand. "Pemahaman Hadis Eskatologi Perspektif Teori Strukturalisme: Pendekatan Mongin Ferdinand De Saussure." *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam* (2025): 196–208.
- Baytar, Yaşar Seracettin. "Hadislerde Beyân ve Bedî İlmiyle İlgili Edebî Sanatların Kullanıma Dair Örnekler." *Jurnal Ilmiah>Nama Jurnal* 2022, no. 1 (2022): 0–1.
- Clercy, Cristine de. "The Complex Challenges of Modern Leadership: A Scholarly Overview of Ethics, Democracy, and Political Leadership." *Politics and Governance* (t.t.). <https://doi.org/10.17645/pag.11151>.
- Damanik, Anisah Khoiriyah, dan Februati Trimurni. "Religion Education Social Laa Roiba Journal." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 9 (2025): 804–13. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i9.9727>.
- Farhanah, Nurul Ashfiya. "Menangkal Radikalisme dalam Hadis tentang Perintah Perang melalui Reinterpretasi Kontekstual." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 272–84. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14566>.

- Fauziah, Mira. "Principles of Listening in The Quran and Their Development in Islamic Preaching: A Study of Surah Al-Nahl/16:78." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 20, no. 2 (2023): 361. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.19452>.
- Firdaus, Haydar, dkk. "Komunikasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dalam Membangun Citra Destinasi Edukatif: Studi Tiga Lokasi Wisata di Jawa Timur." *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi* 5, no. 4 (2025): 404–11.
- Firdaus, Mohamad Anang. "Linguistic Complexity in Hadith: An Examination of the Role and Origins of 'Al-Kalimat Al-Mubtakirah' in Hadith." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 24, no. 2 (2023): 425–50. <https://doi.org/10.14421/qh.v24i2.4634>.
- Firdaus, Muhammad Taufiq, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. "Integrasi Keilmuan dalam Kritik Matan Hadis." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2020): 153–76. <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i2.96>.
- Hamdan, Hady J., Hanan Al-Madanat, dan Wael Hamdan. "Connotations of Animal Metaphors in the Jordanian Context." *Psycholinguistics* 33, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31470/2309-1797-2023-33-1-132-166>.
- Harjum, Mohamad. "Majāz Mursal: Kajian Bentuk Dan Fungsi Dalam Bahasa Arab." *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies* 5, no. 4 (2025): 136–44.
- Hasanah, Umdatul. "Rhetoric in Islamic Tradition: Paradigm and Its Development." *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 15, no. 2 (2021): 241–52. <https://doi.org/10.24090/komunika.v15i2.4570>.
- Hussin, Mohamad, Haji Mohammad Seman, Mat Taib Pa, Ahmad Arifin Sapar, Syakirah Rifa'in @ Mohd Rifain, dan Yoyo Yoyo. "Pendekatan Kinayah dalam Komunikasi Rasulullah SAW." *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 8, no. 2 (2023): 1178–92. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v8i2.406>.
- Idris, Abdul Fattah. "Hadis Prediktif dalam Kitab Al-Bukhari." *Jurnal Theologia* 24, no. 1 (2016): 285–306. <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.325>.
- Iqbal, Muhammad, dan Ridwan Ridwan. "Examining A Reintegration of Islamic Values toward Good Islamic Governance." *Preprint*, 10 November 2025. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7555946/v1>.
- Itsnaini, Salsabila, Muhammad Alif, dan Hikmatul Luthfi. "Penerapan Studi Hadis Tematik di Bidang Politik dan Ketatanegaraan." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 238–50.
- Jonteng, Siti Elmira, Yazid Yahya, Siti Farida Salleh, Nurul Aida Abdullah, dan Mary Fatimah Subet. "Imej Perlambangan 'Tangan' dalam Simpulan Bahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif." *Asian People Journal (APJ)* 4, no. 1 (2021): 108–31. <https://doi.org/10.37231/apj.2021.4.1.261>.
- Khaerunnisa, Hilda, dan Farhan Firdaus. "A Balāghah Analysis of Majāz Mursal Usage in the Verses of the Qur'an." *Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban* 7, no. 1 (2026): 69–86.
- Mubarok, Ahmad Agis. "Sejarah Sosial-Politik Arab: Dari Hegemoni Romawi-Persia Hingga Kebangkitan Arab Islam." *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): 64–76. <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i1.1879>.
- Mukhtar, Mukhlis. *Syarh Al-Hadis dan Fiqh Al-Hadis*. Jilid/Vol. 4. Kota Terbit: Penerbit, 2018.
- Nur Rochim, Mohammad Rizal, Kharis Nugroho, dan Andri Nirwana. "The Meaning of the Word 'Wazir' in the Qur'an: A Semantic Analysis." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 20, no. 2 (2023): 385. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.20205>.

- Ramdini, Henri. *Tipologi Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual*. Kota Terbit: Penerbit, 2023.
- Revista, Zen, dan 10 History. "Beyond the Tribe: Muhammad's Prophetic Statecraft and the Forging of Rashidun Dominion." *Zenodo*, 2 Desember 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17788903>.
- Rizqi, Maulidyah Amalina, dan Abdul Kadir Alamudi. "Analisis Kepemimpinan Islami pada Era Modern." *Jurnal Manajerial* 12, no. 2 (2025): 315–31. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v12i02.9782>.
- Sabrifha, Eli, Khairunnas Jamal, dan Mochammad Novendri S. "Typology of Learning The Meaning of Hadith on Yusuf Al-Qaradhawiy Perspective." *Ambarsa: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 100–116. <https://doi.org/10.59106/abs.v2i2.77>.
- Saefudin, Rifal, Ahmad Maftuh Sujana, Dini Handayani, Nurelizah Nurelizah, dan Muhammad Azka Nabhan. "The Leadership of Prophet Muhammad: A Role Model of Politics and Ethics in the Modern Era." *Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities* 6, no. 1 (2025): 134–40. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v6i1.238>.
- Saleh, Fatulloh. "Teori Formalisme – Balaghah." *Buletin Al-Turas* 20, no. 1 (2020): 147–58. <https://doi.org/10.15408/bat.v20i1.3753>.
- Saputra, Andi Tri. "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, dan Penafsiran Quraish Shihab tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)." *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 2 (2021): 8–12.
- Silaban, Muhammad Rizky. "Ulil Abshar Abdalla's Criticism of the Caliphate Concept of Hizbut Tahrir in Indonesia." *Islamic Thought Review* 1, no. 1 (2023): 33. <https://doi.org/10.30983/itr.v1i1.6411>.
- Siregar, Khairil Ikhsan. "Hermeneutika Hadis tentang 'Hidupkan Saya Bersama Orang Miskin' (Analisis Kualitas dan Sharh Hadis)." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 1 (2021): 111–28.
- Supriyanto, Supriyanto. "Religion and State in the Perspective of Islamic Thought." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 2 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i2.1469>.
- Thayyibah, Uyun, Puji Sumeh Pangestu, dan Raswan Raswan. "Majaz dalam Puisi 'Asyhadu An Lâ Imra'an Illâ Anti' Karya Nizar Qobbani." *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab L-Dhad* 4, no. 1 (2025): 1–7. <https://doi.org/10.54892/jpbal-dhad.v4i01.627>.
- Ulin Nuha, Muhammad Afthon, dan Nurul Musyafaah. "Majaz Isti'arah Analysis Terms of Mulaim in Arabic Oral Perspective." *Lisanudhad: Jurnal Bahasa, Pembelajaran dan Sastra Arab* 9, no. 2 (2022): 164. <https://doi.org/10.21111/lisanudhad.v9i2.8909>.
- Uyuni, Yuyun Rohmatul, Siti Nuryulia, Aang Saeful Milah, Moch Mu'izzudin, dan Agna Hawari. "Arabic Qur'anic Near-Synonymy: A Corpus-Based Analysis of Al-Raghib Al-Aṣṣfahani's Mufradat Alfaz Al-Qur'an." *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab* 18, no. 1 (2026): 87–110. <https://doi.org/10.24042/4h3p6t28>.
- Winda Islamitha Nurhamidah, Nur Azizatul Haqiah, Lutfiah Holifa Balkis, Amri Saputra, dan Ahmad Arifi. "Pendekatan Hermeneutik dalam Pengkajian Hadis: Analisis Pemaknaan Hadis Tentang Peran Perempuan di Ranah Publik." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 166–77. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i3.7329>.
- Yildirim, Abdullah. "Miftâhu'l-Ulûm'da İlmü'l-Edeb Kavrayışı." *Nama Jurnal Turki* 8, no. 2 (2022).